

EVALUASI PROGRAM GERDU KEMPLING BIDANG EKONOMI DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Oleh:

Tiara Nurfaahmi, Dra. Dyah Lituhayu, M.Si

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

“GERDU KEMPLING” is one of poverty reduction programs which is undertaken by the municipal government of Semarang. The program is led by Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Semarang which based on five fields namely health, economic, education, infrastructure and environment field. In this study, the writer focused on the field of economic. The research methodology used in the study was qualitative descriptive approach while the data collecting technique used purposive sampling, interview and document study. The informants in the research were Subdivision Head of Development Planning on Governance, Social, Cultural BAPPEDA Semarang, Section Head of Welfare and Social Pedurungan, Section Head of Welfare and Social Plamongansari and Tlogosari Kulon, as well as Pedurungan sub-district society. The research result shows that the implementation of “Gerdu Kempling” program on the economic field in Pedurungan sub-district is not optimal. It is proven by the number of poor people in Pedurungan sub-district which is increased every year. It also does not reach the target of 2% per year. However, there is a village that is successfully empowered, namely Gemah village. While other villages said to be failed. From the result of the research, it can be seen that many poor people in Pedurungan sub-district do not receive any help. A recommendation that can be carried out to increase the implementation of poverty alleviation program in Pedurungan sub-district is the commitment and concern from the whole parties as well as high willingness to create continuity, both on the attention, supervision, and evaluation so that the assistance can be realized and is on target.

Keywords: “Gerdu Kempling”, Evaluation, Semarang, Pedurungan Sub-district, Poverty

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Semarang terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang terjadi karena semakin pesatnya perkembangan kota Semarang sebagai industri sehingga merangsang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di kota Semarang menjadi tugas baru bagi Pemerintah agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi, termasuk aspek konsumsi dan pendapatan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selaintimbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu

negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang

Tahun	Jumlah
2011	88 453
2012	83.346
2013	86 734
2014	84.640
2015	367.848
Total (jiwa)	543.044

Sumber semarangkotabps.go.id

Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami fluktuasi karena pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Sehingga muncul program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Semarang khususnya dalam Penanggulangan Kemiskinan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Oleh karena itu dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program-program pembangunan memiliki visi “Terwujudnya Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera.” Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan diprioritaskan pada pencapaian Sapta Program yang meliputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Penanganan Rob dan Banjir, Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kesetaraan Gender, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Menurut Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang memiliki tujuan, diantaranya ;

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Diteruskan dengan Keputusan Walikota Semarang No. 465/ 032/ 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang yang diperbarui dengan Keputusan Walikota Semarang No. 465/146/ 2014 kemudian Instruksi Walikota Semarang No. 054 / 2 / 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang melalui Program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (Gerdu Kempling) Tahun 2011, yang dilanjutkan dengan Instruksi Walikota Semarang Nomor : 050 / 205 / 2014. Upaya Percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kota Semarang lewat kebijakan dan program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang melalui Gerdu Kempling.

Pada Gerdu Kempling ini masing-masing SKPD memberikan usulan kegiatan yang dicanangkan untuk mengentaskan kemiskinan di kota Semarang. Kegiatan yang direkomendasikan masing-masing SKPD diantaranya;

1. Dinas Kesehatan: program jamkesmas bagi warga miskin.
2. Disnakertrans : pelatihan wirausaha baru , pelatihan dan bantuan peralatan, pelatihan tenaga siap pakai, dan padat karya produktif.
3. Dinas Koperasi dan UKM : fasilitasi pengembangan usaha mikro, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan pengolahan limbah.
4. Dinas Pertanian : penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan, pengembangan agribisnis Peternakan.

5. Kantor Ketahanan Pangan : Pengembangan keluarga Mandiri Pangan, Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin dan Pengembangan Penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan : Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
7. Bagian Perekonomian Setda :Peningkatan : Peningkatan Ketahanan Pangan untuk 55.221 keluarga rumah tanpa sasaran.
8. Dinas Pendidikan : Dana BOS dari Pemerintah Pusat
9. DTKP: Perbaikan lingkungan pemukiman, infrastruktur Perumahan dan Permukiman.
10. Bapermas Per& KB : pemberdayaan masyarakat melalui PNPM.

Gerdu Kempling sendiri telah melaksanakan programnya di 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Salah satunya adalah Kecamatan Pedurungan yang merupakan wilayah pemukiman baru dengan kondisi penduduk terpadat di kota Semarang. Pada tahun 2016 tercatat ±180.692 jiwa, Selain itu tercatat ada 26.237 warga miskin yang berasal dari kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, korban PHK maupun warga yang tidak berpotensi seperti lansia atau difabel. Masih banyak warga miskin yang tinggal di lingkungan kumuh, dan rumah yang tidak layak huni. Sehingga peran Pemerintah Kota Semarang sangat diperlukan dalam menangani permasalahan kemiskinan yang ada di Kecamatan Pedurungan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16) pada pasal 6 ayat 3 mengamanatkan bahwa kegiatan Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang harus dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, namun jumlah warga miskin di Kecamatan Pedurungan justru mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut;

Tabel 1.3
Rekapitulasi Warga Yang Berada
Digaris Kemiskinan Di Kota
Semarang Tahun 2011 dan 2015

Kecamatan	Tahun 2011	Tahun 2013	Tahun 2015
Semarang Tengah	19.392	16.613	17.791
Semarang Utara	55.458	42.907	44.495
Semarang Timur	26.534	21.587	20.090
Gayamsari	25.563	22.202	21.311
Genuk	29.859	24.541	25.513
Pedurungan	22.743	25.695	26.237
Semarang Selatan	20.710	20.403	21.477
Candisari	26.675	24.430	24.220
Gajahmungkur	15.612	15.561	15.705
Tembalang	46.374	33.901	35.537
Banyumanik	20.473	15.079	14.428
Gunungpati	23.603	19.872	17.569
Semarang Barat	52.805	43.637	39.136
Mijen	18.694	14.783	14.605
Ngaliyan	28.044	20.834	21.372
Tugu	15.859	10.933	9.607

(Per-Kecamatan)

Sumber: Bappeda Kota Semarang 2015

Dari tabel rekapitulasi warga miskin di Kecamatan Pedurungan diatas, terlihat bahwa jumlah warga miskin di Kecamatan Pedurungan setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun telah dilaksanakan program Gerdu Kempling, hal ini disebabkan karena tidak seluruh lapisan masyarakat tersentuh dengan program pemberdayaan, dalam kasus ini bidang ekonomi sangat berperan bagi perbaikan ekonomi warga miskin karena Gerdu Kempling yang menggunakan pendekatan Tri Bina untuk memberdayakan warga miskin. Selain itu terdapat data yang menunjukkan realisasi alokasi anggaran yang diberikan SKPD, Pemerintah

kota maupun provinsi kepada kelurahan Pedurungan sebagai berikut;

No	Tahun	Anggaran	Sasaran
1	2011	Rp.76.747.800 (Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Bintel akses permodalan bagi 240 PUM, bantuan barang/ peralatan sarana/pras. Produksi)	6 kelompok (120 orang)
		Rp. 25.887.600 (Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pengolahan Limbah industri dlm menjaga kelestarian kawasan UMKM)	6 kelompok (120 orang)
		Rp.34.687.500 (Bantuan pelatihan dan peralatan sarana produksi)	3 kelompok
2.	2012	Rp.25.549.800 (Pelatihan kewirausahaan : Boga, Menjahit, Salon)	3 kelompok
		Rp. 13.965.780 (Pengembangan usaha mikro)	3 kelompok
		Rp. 26.708.750 (Pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama KUBE tambak lele)	1 kelompok
		Rp. 48.173.850 (Pengembangan usaha mikro)	3 kelompok / 60 orang
3	2013	Rp. 39.409.350 (Pelatihan kewirausahaan : Boga, Menjahit, Salon)	3 kelompok / 90 orang
		Rp. 39.486.780 (Bantuan usaha	2 kelompok /

		Boga, Menjahit, Salon)	75 orang
4	2014	Rp. 56.241.900 (Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan)	6 kelompok
		Rp. 22.349.250 (Bantuan Peralatan Usaha menjahit, salon dan pembuatan roti)	3 kelompok
5	2015	Rp. 133.658.650 (Pelatihan dan pemverian bantuan kewirausahaan : Boga, Menjahit, Salon)	10 orang
		Rp. 1.400.000 (Pelatihan pangan lokal)	10 orang
		Rp. 25.000.000 (Pelatihan batik)	30 orang

Sumber : Bappeda Kota Semarang 2015

Berdasarkan jumlah warga miskin yang justru semakin meningkat di Kecamatan Pedurungan membuktikan hasil dari program pengentasan kemiskinan yang belum optimal dan terdapat berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan Gerdu Kempling di bidang ekonomi sehingga penulis perlu melakukan sebuah kajian/penelitian mengenai evaluasi program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Gerdu Kempling Kecamatan Pedurungan adalah

1. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Gerdu Kempling bidang ekonomi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam evaluasi Gerdu Kempling bidang ekonomi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

C. TEORI

C. 1. EVALUASI KEBIJAKAN

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut tentang estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan begitu evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Evaluasi adalah kegiatan yang berguna untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru bisa dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Apabila evaluasi dilakukan terlalu dini maka outcomedan dampak dari kebijakan tersebut belum tampak (Subarsono, 2005:21).

Dari proses kebijakan, dapat dilihat bahwa selalu ada sisi evaluasi kebijakan dari setiap kebijakan publik. Namun, sebagian besar dari kita memahami evaluasi kebijakan publik sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya, evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan, karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak.

Sejumlah penulis mengaitkan evaluasi dengan kebijakan publik, Rossi dan Freeman (Wirawan, 2011:87) menyatakan mengenai evaluasi sebagai berikut

“Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social intervention programs”.

Menurut Vendung (dalam Wirawan, 2011:88) evaluasi melihat ke belakang agar dapat menyetir ke depan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematika, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan

hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin.

Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga politik, akan tetapi juga dilakukan oleh perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan menciptakan program, proyek dan produk baru yang perlu dievaluasi. Lembaga swadaya masyarakat juga merancang dan melaksanakan program dan proyek sebagai intervensi sosial untuk menciptakan perubahan sosial yang juga perlu dievaluasi nilai dan manfaatnya.

C.2 Model Evaluasi Context, Input, Process dan Product (CIPP)

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif – alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya mendefinisikan dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintesis informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi.

Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*product Evaluation*).

D. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Aspek Konteks

Aspek konteks merupakan latar belakang Gerdu Kempling perlu dilaksanakan karena tingginya angka kemiskinan di Kota Semarang sehingga Pemerintah Kota Semarang perlu mengembangkan strategi dan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, sebelumnya terdapat berbagai macam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang seperti; program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga salah satunya program keluarga harapan, kemudian program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan seperti PNPM Mandiri, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan masih banyak program-program lainnya tetapi belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang karena program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin, seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen sehingga Pemerintah kota Semarang berupaya melakukan Gerdu Kempling sebagai sinergitas dari berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang bersifat memberdayakan masyarakat dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Namun dalam realisasinya Gerdu Kempling ini sudah dilaksanakan diseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Semarang. Namun dalam mencapai tujuannya, Gerdu Kempling khususnya di Kecamatan Pedurungan ini belum optimal karena jumlah warga miskin tidak turun 2% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena relevansi program pemberdayaan yang berupa pemberian bantuan yang diberikan di prioritaskan untuk merubah mindset

masyarakat dan melatih berwirausaha apapun profesinya. Sehingga penempatan program dan pelatihan menjadi kurang efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Kemudian warga miskin sebagai sasaran utama Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan ternyata tidak seluruhnya tersentuh program pemberdayaan, hanya 20-40 orang yang dibentuk dalam kelompok yang diberi pelatihan. Sehingga keberlanjutan pemberdayaan di Kecamatan Pedurungan tidak tercapai dan target sasaran strategisnya hanya berjangka pendek.

2. Aspek masukan

Aspek masukan merupakan sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling. Sumberdaya yang diperlukan antara lain kebijakan anggaran dan sumberdaya manusia. Dalam wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat diketahui bahwa kebijakan anggaran untuk Gerdu Kempling sebenarnya sangat baik karena sumber anggaran sudah di atur dalam Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber anggaran untuk program Gerdu Kempling ini berasal dari APBN, APBD Provinsi maupun kota, Bantuan CSR, BAZ, dan Swadaya Masyarakat. Anggaran yang dikeluarkanpun tidak lepas dari bantuan SKPD dan jumlahnya Milyaran serta dilaporkan dengan transparan. Anggaran yang disediakan juga sudah dibagi dan direncanakan untuk setiap bidang program secara berimbang, tetapi realisasinya tidak semua warga miskin diberi pelatihan dan bantuan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, hanya sekitar 20-40 orang yang mendapat pelatihan serta bantuan peralatan, sebagai contoh pemberdayaan yang seharusnya diberi bantuan oleh BTN yang dilakukan di Kelurahan Plamongansari adalah membangun

tambak lele, tetapi dalam realisasinya tidak ada bantuan anggaran meskipun sudah mengajukan permintaan bantuan berupa proposal tetap tidak ada yang menindaklanjuti dan sampai saat ini tidak ada tambak lele yang berhasil dibangun di kelurahan ini. Sehingga terjadi gap dalam pelaksanaan alokasi anggaran Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan. Waktu yang dilaksanakan juga hanya 1-3 bulan untuk sosialisasi serta pelatihan, sehingga kurang efektif bagi warga miskin yang memerlukan banyak pelatihan ketrampilan. Masukan berupa informasi juga dinilai belum optimal yang disebabkan oleh pengambilan keputusan yang dilakukan pelaksana yang tidak secara Bottom Up sehingga tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan warga miskin. Kemudian untuk sumberdaya manusia yang terlibat dalam Program Gerdu Kempling ini terdapat SKPD, CSR maupun Perbankan, Pengusaha, Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Semarang. Sehingga sumberdaya manusia yang terlibat dapat dinilai berkompeten dalam bidang politik, ekonomi maupun pendidikan. Namun dalam realisasinya di masing-masing kelurahan, tidak semua SKPD maupun CSR memberikan bantuan, hanya beberapa dan bahkan ada kelurahan yang tidak mendapat bantuan dari CSR. sebagai contoh pemberdayaan yang telah dilakukan di kelurahan Plamongsari berupa usaha bandeng presto, para warga miskin menggunakan swadaya masyarakat untuk mendanai usaha mereka, fakta dilapangan ditemukan bahwa bantuan yang diterima untuk usaha ini hanya berjumlah dua juta rupiah sebagai modal untuk membeli alat tetapi anggaran masih kurang, sehingga mereka harus menggunakan dana pribadi dan itupun tidak seberapa, laba yang mereka peroleh juga kembali modal untuk membeli alat, belum merasakan hasil karena bantuan yang diberikan sangat kurang. Sehingga input berupa anggaran maupun

sumberdaya manusia yang diberikan dalam program Gerdu Kempling di bidang ekonomi ini masih belum optimal karena masih ditemui kegagalan dalam melakukan pemberdayaan dan belum dapat direalisasikan sampai saat ini.

3. Aspek Proses

Aspek proses untuk mengetahui sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan program untuk mencapai tujuan. Proses yang dilakukan dalam program Gerdu Kempling ini diantaranya Pendataan, Sosialisasi, Penurunan Anggaran, Alternatif Pemberdayaan serta Monitoring. Proses pendataan yang dilakukan oleh pelaksana merupakan langkah awal yang sangat penting agar bantuan sosial yang akan diberikan tepat sasaran dan digunakan sebagaimana fungsinya seperti yang telah di atur dalam regulasi. Tetapi metode yang digunakan dalam pendataan ini dinilai kurang efektif dan kurang pengawasan. Meskipun sudah diberikan kategori warga miskin seperti Warga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin tetapi kuesioner yang digunakan bersifat longgar, sehingga mendapatkan data warga miskin dengan jumlah yang sangat besar. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kecamatan tidak dapat dipungkiri jika masih ada warga mampu yang menerima bantuan tersebut. Karena pendataan juga melibatkan pihak RT/RW. Masih banyak RT/RW yang mengutamakan hubungan kedekatan dengan tetangga dalam mendata sehingga warga yang seharusnya mendapat bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan dinilai tidak adil dan merata. Pihak TKPKD pun sulit untuk mengawasi karena jumlah warga miskin yang banyak dan tugas yang mereka limpahkan kepada pihak yang bertugas dilapangan ternyata tidak memegang amanah dengan baik. Penulis menemukan fakta di lapangan yang menjadi anggota program Gerdu Kempling di masing-masing kelurahan Kecamatan Pedurungan hanya 20-40 orang, sehingga berdampak pada tidak

optimalnya warga miskin yang terserap untuk diberi bantuan maupun diberdayakan. Jika langkah awal sudah tidak tepat maka dapat dikatakan gagal di awal karena bantuan yang tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan.

. Setelah pendataan, proses yang dilakukan selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan wadah penting untuk memberikan informasi, pengetahuan dan merubah cara pandang masyarakat. Warga miskin di Kecamatan Pedurungan tidak hanya sekali mendapat program pengentasan kemiskinan dan tidak jarang mereka hanya mendapat janji janji tanpa ada bukti sehingga kepercayaan mereka terhadap Pemerintah semakin menurun, Untuk itu agar program pemberdayaan seperti Gerdu Kempling yang akan diberikan perlu disosialisasikan. Agar lebih efektif dari pihak TKPKD menjelaskan menggunakan tokoh masyarakat setempat untuk mengajak warganya agar mau mengikuti sosialisasi, menurutnya tokoh yang disegani mampu mempengaruhi mereka dan warga menjadi patuh untuk di beri pengarahan. Kemudian pihak kecamatan menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah sebar pamflet, undangan dan MMT. Tapi dengan metode itu masih kurang efektif karena banyak warga yang tidak hadir, sehingga pihak Kelurahan akhirnya mendatangi rumah warga satu per satu untuk mengundang, hal ini pun masih terdapat hambatan yaitu profesi warga miskin, misalnya sebagai buruh cuci dan waktu sosialisasi bertepatan dengan jam kerja mereka sehingga mereka tidak bisa hadir dan diwakilkan orang lain. Akhirnya yang diberikan sosialisasi menjadi tidak sesuai target. Kemudian proses penting selanjutnya adalah penurunan anggaran. Sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa kebijakan anggaran yang disediakan untuk Gerdu Kempling ini cukup besar sehingga penurunan anggarannya perlu dipertanggung jawabkan agar anggaran bisa direalisasikan. Alur penurunan anggaran

Gerdu Kempling ini sebelumnya sudah diketahui bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun kota, CSR, BAZ dan Swadaya Masyarakat. Dalam hal ini SKPD memberikan bantuan dari APBN dan APBD. Kemudian pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberian bantuan dari CSR dan dilanjutkan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk membuat proposal yang nantinya bantuan sosial akan diberikan kepada kelompok sasaran warga miskin. Sebelumnya pihak TKPKD juga sudah menjelaskan bahwa syarat dan mekanisme bantuan sosial yang diatur dalam permendagri No 39 Tahun 2012 sangat rumit, maka pihak TKPKD untuk mencegah dugaan kasus korupsi, pihak TKPKD hanya sebagai fasilitator tetapi tidak menampung bantuan baik berupa uang maupun barang, TKPKD hanya memberikan data calon penerima bantuan. Tetapi fakta dilapangan, bantuan dari CSR tidak ada yang turun ke masyarakat. Bantuan yang diterima hanya berupa pelatihan dari SKPD , dana yang diperoleh dari SKPD pun dari APBN dan APBD Provinsi maupun kota sudah digunakan untuk pemberian barang dan kebutuhan pelatihan . Sehingga saat masyarakat akan membangun program seperti tambak ikan lele tidak dapat direalisasikan karena dana tidak ada. Setelah pelatihan mereka berhenti, ada yang berjalan jika ada bantuan barang, tetapi tidak semua warga menerima bantuan tersebut. Dengan rumitnya mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 tersebut mengakibatkan pihak pelaksana saling melempar tanggung jawab dalam memberi bantuan. Selanjutnya proses alternatif pemberdayaan. Fakta dilapangan yang penulis temukan adalah setelah adanya pelatihan dan masih adanya kendala anggaran maka perlu adanya alternatif seperti inisiatif pihak kelurahan. Salah satu keluarahan yang penulis temukan dalam melakukan inisiatif yaitu Kelurahan Tlogosari Kulon dengan memiliki kepedulian untuk mengembangkan program dan mencari

dana ke Provinsi. Tetapi yang penulis sayangkan adalah Kasi Kesejahteraan dan Sosial Kelurahan Tlogosari Kulon menggunakan anggaran pribadinya dalam memenuhi syarat agar mendapat bantuan dari provinsi dan tidak ada yang mengganti anggaran pihak Kelurahan, setelah program dapat berjalan, ternyata terdapat permasalahan mengenai munculnya peraturan baru yang akan di jelaskan penulis di aspek lain. Hal terakhir dalam proses Gerdu Kempling adalah monitoring. Pengawasan sangat penting bagi berjalannya suatu program untuk menilai bagian mana yang salah dan dapat diperbaiki di masa mendatang. Selain itu pengawasan berguna untuk menjamin apakah program dapat mencapai tujuan dan berhasil maksimal. Penulis menemukan fakta dilapangan bahwa TKPKD tidak melakukan monitoring secara langsung, justru laporan monitoring yang diminta oleh TKPKD berasal dari laporan kelurahan, padahal yang melakukan pelatihan merupakan SKPD disini yang terlibat yaitu Bapermas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Semarang, seharusnya dinas yang melakukan pelatihanlah yang memberikan laporan monitoring kepada TKPKD. Sebagai contoh pemberdayaan yang telah dilakukan di Kelurahan Tlogomulyo pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga telah mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa tambak lele tetapi setelah bibit mulai panen ternyata pemberdayaan ini gagal dikarenakan Kasi Kesos yang membimbing mereka harus dipindah ke kelurahan lain dan pihak SKPD seperti Disospora tidak ada yang mengawasi sehingga warga di Kelurahan Tlogomulyo berebut hasil panen dan tidak ada bibit yang disisakan untuk ternak sesi kedua. Kegagalan pemberdayaan tersebut karena kurangnya monitoring karena monitoring berasal dari kelurahan dan pihak kelurahan tidak dapat berbuat lebih meluas jika tidak ada bantuan, dan saling melempar tanggung jawab maka laporan pelaksanaannya tidak ada, hanya ada

laporan kurangnya bantuan dan pihak TKPKD kurang mengetahui perkembangan warga miskin yang ada di Kecamatan Pedurungan. Sehingga dalam pelaksanaannya monitoring dalam program Gerdu Kempling tidak optimal dan laporan monitoring yang ada selama ini hanya bersifat formalitas tidak ada tindak lanjut dari pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses Gerdu Kempling bidang ekonomi yang ada di Kecamatan Pedurungan tidak berjalan baik, pendataan yang tidak tepat sasaran karena pihak pelaksana yang tidak akuntabel dan profesional serta kurangnya pengawasan, sumberdaya manusia yang tidak mumpuni atau tidak mampu berinteraksi secara maksimal karena berbagai permasalahan seperti undangan yang ditolak warga karena profesi mereka berhalangan hadir, tingkat kepedulian SKPD yang rendah karena yang diutamakan mereka sudah melakukan tugas tidak mencari cara dengan mengetahui karakteristik warga miskin di Kecamatan Pedurungan sehingga mereka bisa menyesuaikan metode sosialisasi yang tepat, penurunan anggaran yang tidak optimal karena rumitnya regulasi, dan akhirnya tidak ada yang mau bertanggung jawab sehingga anggaran tidak sampai ke masyarakat, juga tidak ada regulasi yang mengatur tentang sanksi pertanggungjawaban anggaran dan warga miskin tidak bisa menuntut apapun karena wawasan mereka yang rendah dan kurang informasi bahkan kendala dana dalam melakukan alternatif pemberdayaan, sejauh ini hanya berupa pelatihan saja sehingga alternatif tidak begitu dirasa dampaknya bagi warga miskin. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling.

4. Aspek Produk

Aspek produk yang merupakan hasil keluaran dan dampak dari program Gerdu Kempling. Dalam setiap program yang telah dilaksanakan selama lima tahun perlu dievaluasi apakah hasil

keluaran program tersebut dalam hal ini dapat merubah kualitas hidup warga miskin di Kecamatan Pedurungan. Berdasarkan wawancara di bab 3, penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai hasil produk dari program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan berupa pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang dapat menggali potensi lokal. Kemudian pihak pelaksana membantu dalam proses perijinan UMKM, maupun pengemasan dari produk tersebut yang kebanyakan berupa makanan dan kerajinan tangan Jadi tidak membawa perubahan besar dalam kualitas hidup. Kemudian didapat informasi dari TKPKD bahwa pihaknya telah melakukan upaya promosi melalui event Pemerintah tetapi berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan sejauh ini mereka hanya merasakan kegiatan promosi di bazar kecamatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hasil keluaran dari program ini di bidang ekonomi yang berhasil hanya kue ketawa dari Kelurahan Gemah. Sisanya hampir tidak tersentuh bantuan sehingga secara garis besar warga miskin di Kecamatan Pedurungan belum merasakan manfaat dari Gerdu Kempling karena kualitas hidup mereka yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Penurunan warga miskin sebanyak 2%/th dikatakan belum optimal.

Dampak yang timbul dari sebuah program. Dalam hal ini penulis sudah menganalisis dari aspek input, proses hingga produk selalu ditemui berbagai macam penghambat, dan pada aspek proses penulis sempat membahas mengenai munculnya peraturan baru sebagai faktor utama berhentinya semua usaha UMKM hasil pemberdayaan dari program Gerdu Kempling. Dari hasil wawancara bab 3 penulis mendapatkan informasi bahwa .produk yang berhasil hanya berasal dari Kelurahan Gemah berupa kue “Ketawa” yang dapat dipasarkan di pusat oleh-oleh Pandanaran, faktor pendorong yang mempengaruhi berhasilnya pemberdayaan di Kelurahan

Gemah adalah penempatan program yang sesuai dengan potensi wilayah sehingga terjadi persaingan pasar yang sehat kemudian bantuan pemasaran produk sangat efektif di Kelurahan Gemah, hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran warga dalam dalam merubah perekonomiannya serta pemahaman warga mengenai pengentasan kemiskinan saat di sosialisasi Sedangkan kelurahan lain usahanya sudah berhenti seperti kelurahan Tlogosari Wetan, Tlogomulyo, Kalicari, Pedurungan Kidul, Penggaron Kidul, Muktiharjo Kidul, Pedurungan Lor, dan Pedurungan Tengah, kemudian untuk kelurahan Palebon terdapat usaha serabi, Plamongansari terdapat usaha bandeng presto dan Tlogosari Kulon usaha menjahit , ketiga kelurahan ini hanya mampu memasarkan disekitar lingkungan mereka dan terkendala di alat karena banyak yang rusak dan harus mendanai sendiri. Kendala bantuan alat berawal .saat tahun 2011-2013 dengan peraturan lama yaitu Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang mengharuskan penerima merupakan satu kesatuan dari pengajuan anggaran (KUA/ PPAS). Tetapi sejak tahun 2012 dan adanya Peraturan baru yaitu Permendagri No 39 tahun 2012 tentang hibah dan bansos yang mengharuskan semua bantuan berupa barang harus dikembalikan kepada pihak pelaksana, dan bantuan tidak boleh berupa barang. Seketika usaha UMKM seperti menjahit ataupun mengolah bahan makanan yang peralatannya berasal dari bantuan SKPD harus di kembalikan maka usaha UMKM tersebut berhenti total, karena mereka memerlukan peralatan tersebut maka harus membeli dengan swadaya sendiri, sedangkan mereka tidak memiliki modal dan laba yang selama ini mereka peroleh sudah habis untuk keperluan hidup sehari-hari. Dampak yang ditemui penulis dilapangan bahwa hampir seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan terhenti dan warga miskin yang disebut-sebut akan menerima

bantuan ternyata bantuan tidak kunjung datang karena stakeholder yang tidak tersinergi dengan baik sehingga program ini belum menciptakan keterpaduan. seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan program gerdu kempling kemudian pelaksanaan program gerdu kempling belum tepat sasaran meskipun telah didukung database warga miskin berdasarkan nama dan alamat serta data potensi atau kebutuhan warga miskin yang akan diberi bantuan. keputusan selanjutnya bagi pihak pelaksana dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengadakan Program Gerbang Hebat sebagai inovasi dari Gerdu Kempling tetapi dilengkapi dengan bidang pariwisata. Konsep yang dilakukan dengan memberdayakan kampung tematik sehingga dapat menarik wisatawan untuk melihat kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Semarang sekaligus menambah penghasilan warga miskin.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

- Diperlukannya bantuan pemasaran produk yang efektif.
- Bantuan akan lebih efektif jika warga sudah memiliki usaha mikro dan siap dikembangkan.
- Swadaya masyarakat dalam merealisasikan kegiatan.

2. Faktor Penghambat

- Penempatan program yang tidak tepat sehingga tidak dapat merubah pola pikir sebagian warga miskin untuk merubah nasib..
- Sumberdaya manusia yang tidak mumpuni atau tidak mampu berinteraksi secara maksimal
- Pendataan warga miskin yang tidak optimal
- Penurunan anggaran yang tidak optimal
- Political will pemerintah yang tidak optimal

- Kurangnya monitoring karena hanya berupa laporan pelaksanaan dari kelurahan dan kecamatan.
- Kurangnya program pendampingan dalam pemberdayaan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terpenting dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja kebijakan maupun program. Sehingga dalam Gerdu Kempling Bidang Ekonomi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dinilai belum optimal berdasarkan hasil evaluasi berbagai aspek sebagai berikut; Aspek context memberi alasan Gerdu Kempling perlu dilaksanakan karena selama ini berbagai macam kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Semarang seperti; program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga salah satunya program keluarga harapan, kemudian program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan seperti PNPM Mandiri, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan masih banyak program-program lainnya tetapi belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang karena program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin, seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen sehingga Pemerintah kota Semarang berupaya melakukan Gerdu Kempling sebagai sinergitas dari berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang bersifat memberdayakan masyarakat dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Aspek input atau masukan program Gerdu Kempling bidang ekonomi di Kecamatan Pedurungan berupa sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia. Dalam pelaksanaannya sumberdaya anggaran untuk program ini masih banyak yang tidak terealisasi sampai ke tangan warga miskin yang membutuhkan sehingga rencana kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan dan program menjadi mangkrak, warga miskin hanya mendapat pelatihan. Masukan sumberdaya manusia juga sebenarnya dinilai berkompeten dibidang ekonomi dan pendidikan seperti SKPD dan CSR tetapi pada pelaksanaannya justru saling melempar tanggungjawab, tidak ada yang mengusahakan mencari solusi bagi warga miskin di Kecamatan Pedurungan khususnya dalam pencairan bantuan baik berupa dana maupun barang.

Aspek proses Gerdu Kempling bidang ekonomi yang ada di Kecamatan Pedurungan proses Gerdu Kempling bidang ekonomi yang ada di Kecamatan Pedurungan tidak berjalan baik, pendataan yang tidak tepat sasaran karena pihak pelaksana yang tidak akuntabel dan profesional serta kurangnya pengawasan, sumberdaya manusia yang tidak mumpuni atau tidak mampu berinteraksi secara maksimal karena berbagai permasalahan seperti undangan yang ditolak warga .

Aspek produk program Gerdu Kempling di bidang ekonomi yang berhasil hanya kue ketawa dari Kelurahan Gemah. Sisanya hampir tidak tersentuh bantuan sehingga secara garis besar warga miskin di Kecamatan Pedurungan belum merasakan manfaat dari Gerdu Kempling karena kualitas hidup mereka yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Penurunan warga miskin sebanyak 2%/tahun dikatakan belum optimal. Dampak yang ditimbulkan dari Gerdu Kempling dimana dampak program Gerdu Kempling bidang ekonomi di Kecamatan Pedurungan adalah hampir seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan terhenti dan warga miskin yang disebut-sebut akan

menerima bantuan ternyata bantuan tidak kunjung datang karena stakeholder yang tidak tersinergi dengan baik sehingga program ini belum menciptakan keterpaduan. seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan program gerdu kempling kemudian pelaksanaan program gerdu kempling belum tepat sasaran meskipun telah didukung database warga miskin berdasarkan nama dan alamat serta data potensi atau kebutuhan warga miskin yang akan diberi bantuan. Untuk keberlanjutan program Gerdu Kempling akan dilaksanakan Program Gerbang Hebat sebagai inovasi baru dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dengan memperhatikan fenomena dalam Evaluasi Gerdu Kemling Bidang Ekonomi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Saran yang dapat digunakan untuk Program Gerdu Kempling bidang ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Kecamatan Pedurungan yaitu:
 - Pemerintah dan Kecamatan harus menciptakan lapangan pekerjaan serta menciptakan ruang bagi warga miskin untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan apa yang dibutuhkan warga miskin.
 - Pemerintah jugaharus mensinergikan setiap pihak pelaksana baik SKPD maupun CSR agar kegiatan dan bantuan dapat direalisasikan serta dipertanggungjawabkan.
 - Warga miskin perlu memanfaatkan kesempatan khususnya dengan adanya program pengentasan kemiskinan untuk menambah

wawasan dan merubah pola pikir mereka agar pemberdayaan yang dilakukan dapat berhasil dengan maksimal.

2. Saran yang dapat digunakan untuk memaksimalkan faktor pendorong dan meminimalisir faktor penghambat program Gerdu Kempling bidang ekonomi di Kecamatan Pedurungan yaitu: Perlunya komitmen dan kepedulian dari seluruh pihak serta kemauan yang tinggi sehingga menciptakan kontinuitas baik dalam perhatian, pengawasan maupun evaluasi agar bantuan dapat terealisasi dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bigsten, Anne dalam Gammel, Norman, dkk dalam Budi Jati, ibid: hal 229-230: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Yayasan Agro Ekonomika, Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, Jakarta, 2002, (hal I-1).
- Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, T. Yeremias. 2014. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mudrajad, Kuncoro. 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN
- Nugroho D, Riant, 2005. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Patton, Michael Quinn. Terj (Budi Puspo Priyadi). 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. 2012. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syafi'ie, Inu Kencana,2006, Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Adi Mahasatya
- Wibawa. Samodra, dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi, 2002, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: MadaPressindo.
- Wirawan. (2011). Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumber Dokumen:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang
- Keputusan Walikota Semarang No. 465/ 032/ 2010 yang diperbarui menjadi Keputusan Walikota Semarang No. 465/146/ 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang
- Instruksi Walikota Semarang No. 054 / 2 / 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang melalui Program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Bidang

Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (Gerdu Kempling) Tahun 2011

Instruksi Walikota Semarang Nomor : 050 / 205 / 2014. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rekap Gakin. 2009 - 2015. Dalam http://simgakin.semarangkota.go.id/2014/website/web/rekap_gakin/58.

Diakses tanggal 15 Mei 2016 pukul 14:34

.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB Tahun 2012 dan 2015

semarangkotabps.go.id .

<http://diklat.semarangkota.go.id/storage/app/media/Materi%20Pelatihan/c51318d75c39376c1ca4ea1a60d7ebf8d6aeea84.pdf>

Data Realisasi Anggaran Gerdu Kempling Tahun 2011, Bid. Sosial Budaya Bappeda Kota Semarang, 2011

www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

<http://kecamatanpedurungan.blogspot.co.id/>

di akses tanggal 15 Desember 2016, pukul 16.00

WIB

<http://gratisbook.id/pdf/20443-bab-i-pendahuluan-betasemarangkotagoid>

di akses tanggal 15 Desember 2016, pukul 17.00

WIB

<http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan-daerah-tkpkd/mengenai-tkpkd/>

di akses tanggal 15 Desember 2016, pukul 21.08
WIB

Jurnal :

Rudi Santoso, Adi (2013), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 Tahun 2013
Halaman 1 www.fisipundip.ac.id

Skripsi:

Evaluasi Pelaksanaan Program Penanganan Kumuh dalam Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (Gerdu Kempling) (Studi evaluasi di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang) tahun 2016